MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 638 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai Visi Indonesia Emas, mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, dan mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden yang dinamis, membutuhkan penambahan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 613 Tahun 2026 tentang Kebutuhan Aparatur Sipil Negara secara Nasional Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-191/MK.03/2026 tanggal 21 April 2026;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11832/B-BP.01.01/SD/K/2025 tanggal 31 Juli 2025;
3. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-993/C/Cp.2/11/2026 tanggal 10 November 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Jabatan Fungsional Kesehatan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/4023/2026 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan.

KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 11 November 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 638 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B	**TENAGA KESEHATAN**		**280**	
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
3	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	3	KEJAKSAAN AGUNG | PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL | KLINIK ADHYAKSA PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL
4	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT
5	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
6	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI MALUKU | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU
7	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
8	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
9	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
10	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
11	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
12	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	4	KEJAKSAAN AGUNG | PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL | RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAKARTA
13	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	2	KEJAKSAAN AGUNG | PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL | RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAMBI
14	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
15	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	2	KEJAKSAAN AGUNG | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | KLINIK ADHYAKSA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN AGUNG
16	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	4	KEJAKSAAN AGUNG | PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL | RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAWA TIMUR
17	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
18	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
19	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI MALUKU | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU
20	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
21	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT
22	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
23	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
24	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI BALI | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI BALI
25	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
26	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	2	KEJAKSAAN AGUNG | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | KLINIK ADHYAKSA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN AGUNG
27	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
28	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
29	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
30	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
31	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
32	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI PAPUA | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA
33	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	3	KEJAKSAAN AGUNG | PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL | KLINIK ADHYAKSA PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL
34	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
35	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH
36	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS NEUROLOGI-NEUROVASKULAR, NEUROINTERVENSI, IMAGING, OTOLOGI, OFTALMOLOGI	DOKTER SUBSPESIALIS NEUROLOGI-NEUROVASKULAR, NEUROINTERVENSI, IMAGING, OTOLOGI, OFTALMOLOGI	1	KEJAKSAAN AGUNG | PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL | RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAWA TIMUR
37	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS NEUROLOGI-NEUROVASKULAR, NEUROINTERVENSI, IMAGING, OTOLOGI, OFTALMOLOGI	DOKTER SUBSPESIALIS NEUROLOGI-NEUROVASKULAR, NEUROINTERVENSI, IMAGING, OTOLOGI, OFTALMOLOGI	1	KEJAKSAAN AGUNG | PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL | RUMAH SAKIT ADHYAKSA BANTEN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
147	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	PROFESI PSIKOLOGI (MINAT PSIKOLOGI KLINIS)	2	KEJAKSAAN AGUNG | PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL | RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAWA TIMUR
148	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	PROFESI PSIKOLOGI (MINAT PSIKOLOGI KLINIS)	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
149	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN GIGI | D-III KESEHATAN GIGI | D-III KESEHATAN GIGI DAN MULUT | D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI MALUKU | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU
150	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN GIGI | D-III KESEHATAN GIGI | D-III KESEHATAN GIGI DAN MULUT | D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
151	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN GIGI | D-III KESEHATAN GIGI | D-III KESEHATAN GIGI DAN MULUT | D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI PAPUA | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA
152	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN GIGI | D-III KESEHATAN GIGI | D-III KESEHATAN GIGI DAN MULUT | D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT
153	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN GIGI | D-III KESEHATAN GIGI | D-III KESEHATAN GIGI DAN MULUT | D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
154	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN GIGI | D-III KESEHATAN GIGI | D-III KESEHATAN GIGI DAN MULUT | D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
155	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN GIGI | D-III KESEHATAN GIGI | D-III KESEHATAN GIGI DAN MULUT | D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO | KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
C	TENAGA TEKNIS		1380	
1	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT | KEJAKSAAN NEGERI CIMAHI
2	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH | KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
3	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN | KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA
4	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR | KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
5	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH | KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL
6	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH | KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG
7	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT | KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TASIKMALAYA
8	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH | KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN
9	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT | KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUKABUMI
10	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH | KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG
11	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT | KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON
12	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT | KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI
13	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU | KEJAKSAAN NEGERI KAUR
14	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN | KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR
15	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAMBI | KEJAKSAAN NEGERI TEBO
16	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU | KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU UTARA
17	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAMBI | KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN
18	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT | KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR
19	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT | KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR
20	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAMBI | KEJAKSAAN NEGERI JAMBI
21	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI RIAU | KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR
22	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI RIAU | KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU
23	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI ACEH | KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE
24	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA | KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
25	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN | KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR
26	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA | KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU
27	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI BANTEN | KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG
28	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA | KEJAKSAAN NEGERI TERNATE
29	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI PAPUA | KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA
30	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI BALI | KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
31	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN | KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
32	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA | KEJAKSAAN NEGERI BAU-BAU
33	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU | KEJAKSAAN NEGERI BATAM
34	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT | KEJAKSAAN NEGERI MATARAM
35	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR | KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA
36	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR | KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK
37	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH | KEJAKSAAN NEGERI PALU
38	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT | KEJAKSAAN NEGERI SORONG
39	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT | KEJAKSAAN NEGERI MANOKWARI
40	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO | KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO
41	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU | KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG
42	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI BANTEN | KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN
43	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI BANTEN | KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG
44	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI MALUKU | KEJAKSAAN NEGERI AMBON
45	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN | KEJAKSAAN NEGERI PALOPO
46	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	3	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI BALI | KEJAKSAAN NEGERI BADUNG
47	JAKSA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	2	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR | KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
943	SANDIMAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 INFORMATIKA | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 SISTEM KOMPUTER | S-1 TEKNIK KOMPUTER | D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI | D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER | D-IV REKAYASA KRIPTOGRAFI | D-IV REKAYASA PERANGKAT KERAS KRIPTOGRAFI | D-IV TEKNIK KOMPUTER | D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	KEJAKSAAN AGUNG | KEJAKSAAN TINGGI RIAU | KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

RINI WIDYANTINI

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI